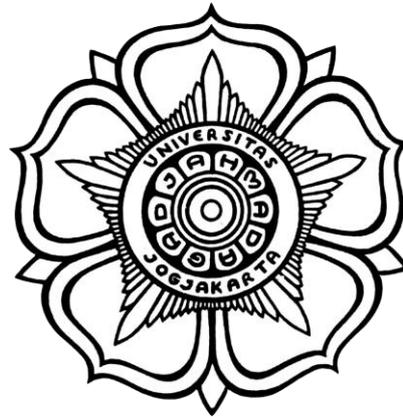


**Pengaruh Tekanan Koersif Terhadap Kualitas Pelaporan SDGs di Era Pandemi
Covid-19: Sebuah Studi Internasional**

Ringkasan Tesis



Oleh:
Tiyas Kurnia Sari
20/465413/PEK/26416

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2022



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 548510, +62 274 548508
Faks. +62 274 563212, http: //www.feb.ugm.ac.id, E-mail: dekan.feb@ugm.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 11821/UN1/FEB.1/SETP/AKM/TA/2022

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama: Tiyas Kurnia Sari
NIM: 20/465413/PEK/26416
Program Studi: Magister Sains Akuntansi
Judul Tesis: PENGARUH TEKANAN KOERSIF TERHADAP KUALITAS PELAPORAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI ERA PANDEMI COVID-19: SEBUAH STUDI INTERNASIONAL
Tanggal Ujian: 11 Oktober 2022
Dosen Pembimbing: Prof. Mahfud Sholihin, M.Acc., Ph.D.
Tim Penguji: Ketua: Sumiyana, Dr., M.Si., Ak., CA.
Anggota: 1. Singgih Wijayana, S.E., M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Mahfud Sholihin, M.Acc., Ph.D.

telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan penguji tesis sehingga dinyatakan telah menyelesaikan revisi tesis final pada tanggal 11 Oktober 2022.

Surat keterangan ini dibuat dan berlaku pada masa tanggap COVID-19 serta dapat dipergunakan sebagai pengganti lembar pengesahan/persetujuan karya tulis akhir untuk syarat yudisium/wisuda pada Program Pascasarjana.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 November 2022

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D.
NIP. 197805202005011002

1. Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah salah satu paradigma dan pedoman pembangunan global yang paling menonjol hingga tahun 2030. Profesi akuntansi adalah salah satu penggerak penting organisasi, pasar keuangan, dan ekonomi, yang memiliki peran penting dalam mencapai SDGs (Adams et al. 2020). Klaim ini terbukti dari fakta bahwa akuntan mendukung 8 dari 17 SDGs (Bebbington dan Unerman 2018).

International Federation of Accountants (IFAC) (2019) mengatakan bahwa akuntan berada di garda terdepan dalam meningkatkan transparansi publik dan swasta. Transparansi perusahaan melalui pelaporan SDGs merupakan salah satu strategi untuk menunjukkan nilai, komitmen, dan kebijakan perusahaan dalam mencapai SDGs (Barbara Kowalczyk Hoyer 2012; Nundy dkk. 2021). Strategi pelaporan SDGs bermanfaat bagi reputasi perusahaan di mata publik dan menjamin bahwa operasi perusahaan mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan (Frey 2022). Kesadaran akan pentingnya kontribusi dunia usaha terhadap pencapaian SDGs juga telah meningkatkan praktik pengungkapan dan pelaporan SDGs oleh perusahaan (Blasco et al. 2018). Scott dan McGill (2019) mendukung klaim ini dengan menganalisis 1.141 laporan perusahaan dari 31 negara dan menemukan bahwa 72% perusahaan sampel telah menyebutkan SDGs dalam dokumen pelaporan, 59% perusahaan menggunakan SDGs sebagai referensi untuk laporan keberlanjutan, dan 34% perusahaan telah mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis mereka. RMIT University dan CPA Australia melakukan penelitian dari 2018-2020 dan menemukan bukti serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga tahun, terjadi peningkatan yang signifikan hingga 25% pada perusahaan yang menyebutkan SDGs dalam laporan tahunan, serta peningkatan 24% dalam prioritas SDGs dalam laporan tahunan (Subramaniam et al. 2019, 2020, 2021)

Tren ini juga mendorong para akademisi untuk mulai memfokuskan penelitian mereka pada pelaporan SDG (Pizzi et al. 2020; Curtó-Pagès et al. 2021) dan mulai meneliti faktor-faktor di balik adopsi pelaporan SDG (Rosati dan Faria 2019b, a; Tsalis dkk. 2020; Pizzi dkk. 2021; Bose dan Khan 2022). Menurut Bebbington dan Unerman (2018), kebaruan isu SDGs membuat berbagai studi ini hanya berkembang selama lima tahun terakhir dan memberikan peluang besar untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Saat ini, program pelaporan SDGs merupakan salah satu strategi yang dapat berperan dalam mengukur pencapaian SDGs di sektor swasta (Subramaniam et al. 2019). Fakta ini tidak terlepas dari karakteristik pelaporan SDGs, yang merupakan mekanisme kelembagaan yang mapan dan alat komunikasi standar antara perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan (Bose dan Khan 2022; Datta dan Goyal 2022). Pelaporan SDGs memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk menilai keterkaitan operasi perusahaan pada pembangunan berkelanjutan (Adams et al. 2020).

Penelitian ini memiliki dua kontribusi terhadap literatur pelaporan SDGs yang terbatas. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji peran tekanan koersif sebagai penentu pelaporan SDGs di era pandemi. Di tengah berkembangnya literatur tentang pelaporan SDGs, penelitian sebelumnya hanya mengkaji praktik kondisi ekonomi ideal tanpa mempertimbangkan krisis seperti pandemi (Rosati dan Faria 2019b; Pizzi dkk. 2020; Bose dan Khan 2022; Datta dan Goyal 2022). Di sisi lain, riset akuntansi yang berfokus pada pandemi berkonsentrasi pada pengaruh pandemi terhadap respons pemerintah, kebijakan, dan penganggaran selama krisis (Anggraini et al. 2022) dan kinerja keuangan perusahaan dan volatilitas serta respons pasar terhadap pandemi (Rinaldi 2022).

Kedua, signifikansi penelitian ini terletak pada pemilihan spesifik mekanisme isomorfisme koersif sebagai bentuk tekanan yang paling mengikat dan formal yang dapat mempengaruhi praktik pengungkapan SDGs. Penelitian sebelumnya masih menggunakan lensa institusional secara umum. Tidak ada penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh isomorfisme koersif pada praktik pelaporan SDGs.

Pelaporan SDGs, salah satu inovasi dalam pelaporan non-keuangan, akan berkembang melalui tiga tahap pelebagaan (Shabana et al. 2017). Fase pertama muncul karena tekanan koersif dengan pelaporan defensif yang, seiring waktu, bergerak ke tahap kedua, ditandai dengan pelaporan proaktif yang disetujui secara normatif. Pada tahap ketiga pelaporan, pelebagaan atau difusi imitatif, manajer yang dihadapkan pada ketidakpastian cenderung meniru organisasi lain dan praktik pelaporan yang telah menyebar luas di berbagai industri dan perusahaan (Carroll 2021).

Dalam melaporkan SDGs, salah satu paradigma baru dalam pelaporan non-keuangan, penulis berpendapat bahwa tekanan yang mendorong adopsi pelaporan masih

dalam tahap awal, yaitu pelaporan defensif (Shabana et al. 2017). Apalagi di era pandemi yang merupakan bagian dari krisis yang dapat mengancam operasional perusahaan, berbagai strategi yang diambil perusahaan cenderung berubah secara defensif akibat tekanan koersif (Galleli et al. 2021). Datta dan Goyal (2022) juga mendukung argumen ini dengan menyarankan studi terpisah untuk mengisolasi berbagai dampak faktor kelembagaan terhadap pengungkapan dan pelaporan SDGs.

Dalam penelitian ini, proksi tekanan koersif dimanifestasikan menjadi tiga tekanan formal. Pertama, kualitas regulasi menggambarkan kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang sehat yang memungkinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta (Kaufmann et al. 2011). Kedua, regulasi keberlanjutan di tingkat negara bagian memiliki kekuatan untuk menekan dan memberi insentif pada penyebaran praktik pelaporan SDGs (Staford-Smith et al. 2017). Ketiga, kekuatan standar audit dan pelaporan yang merupakan b dan infrastruktur kelembagaan akuntansi formal yang dapat mendorong berbagai upaya keberlanjutan oleh perusahaan di tingkat negara (Guidara et al. 2022).

Singkatnya, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kualitas pelaporan SDGs di masa pandemi? Kedua, apakah ada perbedaan kualitas pelaporan SDGs antara negara maju dan berkembang? Ketiga, apakah tekanan koersif menentukan kualitas pelaporan SDGs? Selain itu, untuk memastikan keandalan analisis dan menghilangkan bias, penelitian ini menambahkan dua variabel kontrol untuk mengontrol hubungan antara tekanan kelembagaan dan pengungkapan SDGs. Secara rinci, mengikuti penelitian sebelumnya tentang determinan pelaporan (Rosati dan Faria 2019a; García-Sánchez et al. 2020b) komite tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan sektor perusahaan adalah variabel kontrol dalam penelitian ini.

2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Isomorfisme merupakan salah satu dimensi dalam teori kelembagaan yang menjelaskan proses homogenisasi dalam praktik organisasi, terutama dari tekanan koersif, normatif, atau mimetik dari lingkungan organisasi. Menurut Deegan (2014), tekanan koersif datang dari pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan atas operasi dan sumber daya perusahaan. Normatif berasal dari norma kelompok untuk mengadopsi praktik

kelembagaan tertentu, sedangkan tekanan *mimetik* berasal dari organisasi yang berusaha meniru praktik mereka untuk keunggulan kompetitif atau legitimasi (Deegan 2014).

Ada beberapa alasan untuk memilih teori kelembagaan sebagai landasan penelitian ini. Pertama, teori ini memberikan perspektif komplementer dari teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan (Fernando dan Lawrence 2014). Kedua, teori kelembagaan memberikan gambaran yang lebih komprehensif ketika digunakan dalam penelitian lintas batas (Scott 2005) karena kapasitasnya untuk memberikan gambaran makro dengan bentuk nyata tekanan eksternal dibandingkan dengan teori *dan legitimasi pemangku kepentingan*, yang berfokus pada strategi internal (Campbell 2007).

Ketiga, teori kelembagaan telah banyak digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pelaporan SDGs di tingkat negara, seperti asal negara dan sistem hukum (Cosma et al. 2020; Izzo dkk. 2020; van der Waal dan Thijssens 2020; Emma dan Jennifer 2021; van Zanten dan van Tulder 2021) dimensi budaya Hofstede (Rosati dan Faria 2019b; Pizzi et al. 2022) dan juga kualitas regulasi (Hummel dan Szekely 2021; Pizzi dkk. 2022; Bose dan Khan 2022).

Ada dua aliran utama literatur pelaporan SDGs. Aliran pertama adalah penelitian yang difokuskan untuk mengeksplorasi kemungkinan determinan adopsi Pelaporan SDGs, seperti faktor kelembagaan nasional Rosati dan Faria (2019b), dimensi budaya Pizzi dkk. (2022), dan juga beberapa faktor dalam tingkat pelaporan dan tingkat perusahaan Datta dan Goyal (2022).

Studi-studi ini memiliki keterbatasan yang seragam terkait dengan fokus adopsi SDGs berdasarkan ada atau tidaknya item SDGs dalam laporan tahunan perusahaan tanpa mengintegrasikannya dengan 17 SDGs. Ketiadaan data SDGs yang detail membuat kontribusi dunia usaha terhadap pencapaian SDGs tidak dapat diukur secara andal (Mhlanga et al. 2018) dan meningkatkan risiko SDGs Washing yang merupakan salah satu tantangan terbesar penerapan SDGs di sektor swasta (Munro 2021).

Pada aliran kedua, penelitian yang berfokus pada kualitas pelaporan SDGs, penelitian oleh Pizzi et al. (2020) adalah salah satu contoh yang memperkenalkan skor pelaporan SDGs dan berfokus tidak hanya pada adopsi SDGs tetapi juga pada kualitas pelaporan dan pengungkapan SDGs oleh perusahaan-perusahaan di Italia. Studi lain oleh

Bose dan Khan (2022) adalah contoh lain dalam aliran kedua yang menyelidiki peningkatan kualitas pelaporan SDGs dari waktu ke waktu.

Kontribusi kedua dari penelitian ini adalah dalam setting internasional dan fenomena pelaporan SDGs di era pandemi Covid-19. Studi sebelumnya di aliran kedua masih terbatas pada pengaturan tunggal suatu negara seperti Indonesia (Kuswantoro et al. 2022) dan terutama terkonsentrasi pada negara-negara maju seperti perusahaan di Spanyol (Curtó-Pagès et al. 2021), Cina (Yu et al. 2020), Italia (Pizzi et al. 2020), dan negara-negara di Uni Eropa (Cosma et al. 2020; Nichita dkk. 2020; Emma dan Jennifer 2021). Pengaturan internasional dapat memberikan gambaran umum dan perbandingan praktik pengungkapan SDGs antara negara maju dan berkembang. Perbandingan ini menjawab pertanyaan apakah terdapat kesenjangan pencapaian SDGs antara negara maju dan berkembang di dunia? Penting untuk diketahui bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam mencapai SDGs pada tahun 2030 dengan mendorong penguatan kemitraan dan kerja sama global antara negara maju dan berkembang (Abidoye et al. 2021).

Di sisi lain, penelitian pelaporan SDGs dalam setting pandemi Covid-19 masih sangat terbatas. Penelitian Kuswantoro et al. (2022) merupakan salah satu contoh yang telah meneliti dan membandingkan pengungkapan SDGs oleh perusahaan BUMN dan perusahaan swasta sebelum dan sesudah pandemi. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti determinan pelaporan SDG di era pandemi Covid-19.

3 Pengembangan Hipotesis

Pada bagian selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pelaporan SDGs, penulis membangun hipotesis penelitian tentang hubungan antara tiga tekanan koersif tingkat negara yang berbeda yang mempengaruhi pelaporan SDGs.

3.1 Kualitas Regulasi

Sistem regulasi yang berkualitas tinggi dapat menjembatani kesenjangan antara kepentingan eko-nomik perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan kepentingan masyarakat luas (De Villiers dan Marques 2016). Ekosistem itu memberikan dorongan dan paksaan yang kuat bagi perusahaan untuk mengungkapkan SDGs. Huq dan Stevenson (2020) menjelaskan bahwa di negara berkembang dengan kualitas regulasi

yang buruk, tekanan koersif dari ekosistem regulasi pemerintah terhadap perusahaan lemah dan tidak cukup untuk memberikan paksaan kepada perusahaan untuk mengadopsi praktik pelaporan SDGs.

Di sisi lain, negara-negara maju dengan kualitas regulasi yang tinggi (Kirkpatrick dan Parker 2007) memiliki sistem regulasi yang konsisten dan ditegakkan dengan baik yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melaporkan SDGs (Gupta dan Wang 2004). Kegiatan pelaporan SDGs dapat meredakan ketegangan antara perusahaan dan regulator karena aksi korporasi yang mendukung SDGs dapat memobilisasi dukungan masyarakat (Christmann dan Taylor 2002). Dengan demikian, perusahaan yang berlokasi di negara maju seringkali lebih proaktif dalam melakukan pelaporan sukarela, seperti pelaporan SDGs.

Secara empiris, penelitian sebelumnya tentang pengaruh kualitas regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaporan keuangan memiliki hasil yang beragam. Christensen et al. (2021) menemukan bahwa mekanisme penegakan hukum yang efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan CSR. Penelitian lain oleh Frias-Aceituno et al. (2013) dan (Legendre and Coderre (2013) menunjukkan bahwa perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan orientasi pemangku kepentingan dan menggunakan sistem hukum perdata tertarik pada pelaporan non-keuangan sehingga mereka menggunakan pelaporan yang lebih terintegrasi. Namun, penelitian yang secara eksplisit memeriksa Pelaporan SDGs oleh Vaz et al. (2016), Rosati dan Faria (2019b) dan Bose dan Khan (2022) tidak menemukan bukti orientasi pemangku kepentingan atau pemegang saham pada pelaporan SDGs.

Hasil penelitian sebelumnya belum konklusif mengenai pengaruh kualitas penegakan hukum terhadap pelaporan non-keuangan. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh penegakan hukum terhadap pelaporan SDGs masih sangat terbatas (Rosati dan Faria 2019b; Cosma dkk. 2020; Bose dan Khan 2022). Dua alasan ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, hipotesis pertama adalah:

H1: Kualitas regulasi secara positif mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs

3.2 Regulasi Keberlanjutan

Peraturan dan standar keberlanjutan nasional dapat menekan dan memberi insentif pada praktik keberlanjutan dan ekonomi hijau suatu negara (Stafford-Smith et al. 2017). Setelah munculnya pandemi Covid-19, berbagai pemerintah baik di negara maju maupun berkembang semakin menyadari pentingnya komitmen untuk menyelesaikan masalah pembentukan operasional bisnis yang tangguh yang mendorong pentingnya mengadopsi praktik pelaporan berkelanjutan (Singhania dan Saini 2021). Komitmen tersebut kemudian dituangkan ke dalam kebijakan di tingkat negara bagian yang mewajibkan pelaporan non-keuangan dan sukarela (Girella et al. 2019; Lagasio dan Cucari 2019; Singhania dan Saini 2021).

Pizzi et al. (2020) berpendapat bahwa regulasi keberlanjutan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bentuk nyata dari mekanisme pemantauan dan pengendalian yang dapat digunakan untuk melacak inisiatif perusahaan untuk mengadopsi SDGs, sehingga regulasi keberlanjutan di tingkat negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan pelaporan SDGs oleh perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Rosati dan Faria (2019a) serta Bose dan Khan (2022) menemukan bahwa tingkat pelaporan SDGs menjadi lebih intensif di negara-negara yang sudah memiliki peraturan nasional tentang isu-isu keberlanjutan daripada di negara-negara yang tidak memiliki peraturan tersebut. Narasi yang sama juga diungkapkan oleh (Plastun et al. 2021), yang membuktikan bahwa hukum pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) di tingkat negara mempengaruhi posisi negara-negara dalam peringkat Indeks SDGs. Namun, penelitian lain oleh Nicolò, Zanellato, dan Tiron-Tudor (2020) menemukan bahwa peraturan pelaporan wajib tidak mempengaruhi tingkat keberlanjutan pelaporan perusahaan milik negara di Eropa dan menandakan bahwa tekanan koersif tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut, terdapat kesimpulan mengenai pengaruh peraturan pelaporan keberlanjutan yang dapat bersifat wajib atau sukarela dan tingkat pelaporan SDGs, dan dengan demikian, hipotesis kedua adalah:

H2: Peraturan keberlanjutan secara positif mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs

3.3 Kekuatan Standar Audit dan Pelaporan (SARS)

Orientasi komunikasi informasi akuntansi yang hanya berfokus pada investor telah lama mengakui kekurangannya. Saat ini, perusahaan dituntut untuk mengkomunikasikan bagaimana nilai diciptakan bagi berbagai pemangku kepentingan, salah satunya berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Lopez 2020). Pelaporan SDGs adalah salah satu platform untuk bagaimana perusahaan menyampaikan informasi non-keuangan yang menunjukkan bahwa organisasi beroperasi dengan cara yang mendukung keberlanjutan (Adams et al. 2020). Salah satu faktor eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan adalah kekuatan standar audit dan pelaporan (SARS) (Boolaky et al. 2013; Boolaky dan Cooper 2015; Amara dkk. 2020).

Auditor dan lembaga penegak hukum beroperasi dalam suatu infrastruktur penghitungan ac- kelembagaan yang dibentuk oleh kualitas standar audit dan pelaporan yang berlaku dalam suatu pengaturan (Amara et al. 2020). Mereka dapat mengontrol upaya keberlanjutan suatu negara (Guidara et al. 2022). Negara-negara yang dicirikan oleh tingkat SARS yang tinggi diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar audit dan pelaporan (Boolaky et al. 2013). Penelitian Amara et al. (2020) menunjukkan bahwa SARS memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di lingkungan perusahaan. Standar audit dan akuntansi yang kuat memberi auditor dan lembaga penegak hukum insentif untuk melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan masalah keberlanjutan (LeBaron et al. 2017)

Secara empiris, penelitian sebelumnya telah mencoba untuk melihat lebih dekat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SARS di tingkat negara. Boolaky dan Cooper (2015) menegaskan bahwa infrastruktur kelembagaan seperti pengembangan pasar keuangan, pendidikan tinggi, dan pelatihan mempengaruhi tingkat SARS suatu negara. Penelitian oleh Rahman et al. (2010) memberikan bukti bahwa variabel kelembagaan seperti struktur organisasi, sifat utang, dan regulasi bervariasi secara sistematis antar negara dan bahwa variasi ini menjelaskan kualitas pelaporan keuangan dalam pengaturan internasional. Penelitian terbaru oleh Guidara et al. (2022) juga menemukan bahwa SARS secara positif terkait dengan tingkat keberlanjutan suatu negara.

Namun, kesenjangan penelitian datang ketika tidak ada studi empiris lintas batas tentang apakah SARS mempengaruhi pelaporan SDGs. Bahkan, sebagai bagian integral

dari transparansi perusahaan, SARS menjadi relevan bagi bisnis, pemerintah, dan investor (Boğa-Avram 2014). SARS sebagai infrastruktur kelembagaan yang dapat menekan perusahaan untuk melaporkan SDGs telah diabaikan oleh para sarjana akuntansi. Penelitian ini merupakan yang pertama mengkaji kemungkinan SARS sebagai penentu pelaporan SDGs di tingkat internasional. Dengan demikian, hipotesis ketiga secara resmi menyatakan:

H3: kekuatan standar audit dan pelaporan secara positif mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs

3.4 Variabel Kontrol

Studi ini juga mempertimbangkan komite CSR dan jenis industri sebagai variabel kontrol dalam analisis statistik untuk menghindari hasil yang bias.

Variabel kontrol pertama adalah komite CSR. Dalam sistem manajemen berkelanjutan modern, komite CSR menjadi salah satu bentuk eksper- tise dewan yang secara formal dilembagakan oleh perusahaan (Velte dan Stawinoga 2020). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan dengan membentuk komite CSR memiliki tingkat pelaporan SDGs yang lebih tinggi (García-Sánchez et al. 2020b; Sekarlangit dan Wardhani 2021; Pizzi dkk. 2022)

Variabel kontrol kedua adalah tipe industri. Jenis industri memainkan peran penting dalam mengembangkan laporan berkelanjutan karena, sesuai dengan risiko yang diwakili oleh masing-masing sektor, pemangku kepentingan memiliki tuntutan dan perilaku yang berbeda bagi perusahaan (Amor-Esteban et al. 2019). Perusahaan yang beroperasi di industri dengan risiko lingkungan yang lebih tinggi sering kali berkomitmen pada kinerja keberlanjutan yang lebih tinggi.

4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi berbasis data sekunder yang menggunakan data dari beberapa sumber yang berbeda, seperti database Refinitiv, World Governance Indicator, dan World Economic Forum. Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, data sekunder sering digunakan sebagai salah satu sumber primer dalam penelitian basis internasional yang memerlukan perbandingan antara beberapa negara

dengan beberapa perusahaan multinasional (Smith 2003). Kedua, tersedianya berbagai data ekonomi, akuntansi, dan regulasi yang dapat diakses secara luas dan mudah di era digital ini memberikan peluang bagi riset akuntansi. Hal ini didukung oleh Rengasamy (2017), yang menegaskan peluang besar yang dimiliki akademisi akuntansi untuk ketersediaan sumber data sekunder yang melimpah dan terpercaya.

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai Forbes' Global 2000 pada tahun 2020, berasal dari 61 Negara yang berbeda. Sejak 2003, Forbes' Global 2000 telah mengukur perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan empat metrik tertimbang: total aset, nilai kapitalisasi pasar, pendapatan, dan laba bersih (Murphy et al. 2021). Sampel ini telah banyak digunakan dalam penelitian akuntansi (Frias-Aceituno et al. 2013; AlHares dkk. 2020; van der Waal dan Thijssens 2020). Tabel 1 Panel A akan memberikan gambaran singkat tentang perusahaan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1 Pemilihan Sampel

Panel A: Pemilihan Sampel		
Perusahaan yang terdaftar di Forbes' Global 2000 pada tahun 2020		2.000
Perusahaan dengan data yang tidak lengkap		1.121
Sampel Akhir		879
Panel B: Distribusi Sampel Berdasarkan Industri		
Sektor Industri ¹	Jumlah Perusahaan	% dari Total Sampel
Layanan Komunikasi	36	4%
Diskresi Konsumen	68	8%
Bahan Pokok Konsumen	76	9%
Tenaga	43	5%
Keuangan	228	26%
Pelayanan Kesehatan	52	6%
Industri	113	13%
Teknologi Informasi	77	9%
Bahan	84	10%
Perumahan	47	5%
Utilitas	55	6%
Total Sampel	879	100%

¹ Klasifikasi industri berdasarkan Global Industry Classification Standard (GICS) (MSCI 2022)

Variabel dependen, skor kualitas pelaporan SDGs, diukur menggunakan indeks pengungkapan SDGs yang tidak tertimbang yang digunakan oleh Bose dan Khan (2022) dengan 17 item SDGs untuk menutupi keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya mengukur adopsi pelaporan SDGs dengan variabel dummy (Curtó-Pagès et al. 2021; Pizzi dkk. 2022; Rosati dan Faria 2019a; 2019b). Indeks pengungkapan tanpa bobot memungkinkan pengukuran kualitas pelaporan SDG perusahaan yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya (Tsalis et al. 2020; Bose dan Khan 2022). Basis Data Refinitiv Thomson Reuters tentang SDGs perusahaan adalah sumber data untuk skor kualitas pelaporan SDGs.

Refinitiv telah menganalisis lebih dari 630 ukuran ESG di tingkat perusahaan yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori untuk merumuskan skor dari tiga pilar ESG, yaitu Environment, Social, and Governance, dan memetakannya ke dalam 17 tujuan SDGs (Refinitiv 2022).

Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, indeks pengungkapan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian dalam lingkup pelaporan SDGs (van Zanten dan van Tulder 2018; Nichita dkk. 2020; Tsalis dkk. 2020; Bose dan Khan 2022). Kedua, indeks pengungkapan tidak tertimbang tepat untuk menjawab pertanyaan mengenai kualitas pelaporan dari 17 SDGs, mengingat bahwa semua item SDGs sama pentingnya untuk diungkapkan oleh perusahaan (Cooke 1989; Hossain dan Adams 1995).

Indeks pengungkapan dikotomi tanpa bobot pertama kali diusulkan oleh Cooke (1989) dengan persamaan (1):

$$SDGs\ Reporting\ Score_j = \frac{\sum_{i=1}^m d_i}{\sum_{i=1}^n d_i} \quad (1)$$

Skor Pelaporan SDGs (SRS) keseluruhan adalah rasio skor pelaporan agregat dengan skor pelaporan maksimum yang mungkin (yaitu, 17) untuk setiap tahun perusahaan. Skor SDGs yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pelaporan SDGs yang lebih tinggi.

Variabel independen pertama, kualitas regulasi (RQ) adalah peringkat persentil di antara semua negara dan berkisar dari 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi) dari database *Indikator Tata Kelola Dunia*. Pengukuran ini sejalan dengan beberapa penelitian

sebelumnya di bidang keberlanjutan, seperti (Friedman et al. 2011; Handoyo dan Fitriyah 2018; Mombeuil 2020; Nguyen dan Su 2021).

Variabel independen kedua, regulasi keberlanjutan, memberikan informasi tentang ketentuan pelaporan non-keuangan atau keberlanjutan, termasuk kebijakan, peraturan, pedoman, kerangka kerja, dan standar suatu negara. Sejalan dengan Bose dan Khan (2022), pengukuran variabel diadopsi dari Maso et al. (2020), yang telah menyusun dan mengklasifikasikan peraturan keberlanjutan dari masing-masing negara yang tercantum pada <https://www.wortelandsticks.net/> menjadi wajib atau sukarela dalam tiga aspek ESG. Setiap peraturan wajib dalam setiap aspek akan diberikan nilai 1. Oleh karena itu, nilai total maksimum peraturan keberlanjutan adalah 3 untuk negara-negara dengan peraturan pelaporan wajib di semua 3 aspek ESG. SARS adalah variabel yang memberikan gambaran tentang kualitas lembaga akuntansi suatu negara.

Nilai SARS diukur menggunakan tanggapan terhadap pertanyaan Survei Opini Eksekutif yang diberikan kepada para pemimpin bisnis dan eksekutif dari berbagai negara di seluruh dunia untuk mengevaluasi kekuatan standar audit dan pelaporan Schwab et al. (2020). Skor SARS adalah skor suatu negara yang terkait dengan pertanyaan "di negara Anda, seberapa kuat standar audit dan pelaporan keuangan?" Skor berkisar antara 1-7, dengan 1 menunjukkan SARS sangat lemah dan tujuh berarti SARS sangat kuat (Schwab et al. 2020). Pengukuran ini juga sudah cukup sering digunakan untuk mengukur kualitas lembaga akuntansi dalam berbagai penelitian seperti Boolaky et al. (2013), Amara et al. (2020), dan Guidara et al. (2022)

Variabel kontrol pertama, komite CSR, akan diukur menggunakan variabel dummy 1/0 sesuai dengan keberadaan komite CSR di perusahaan. Variabel kontrol kedua, klasifikasi industri, didasarkan pada ICSRPI (Industrial Corporate Social Responsibility Practice Index) yang dikembangkan oleh Amor-Esteban et al. (2019)

Ada 3 teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, statistik deskriptif dan analisis isi pelaporan 17 item SDGs oleh perusahaan sampel untuk mendapatkan gambaran besar dari data yang dikumpulkan. Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yang berkaitan dengan sejauh mana perusahaan terbesar di dunia melaporkan SDGs di era COVID-19.

Kedua, Independent T Test digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang apakah ada perbedaan dalam pelaporan SDGs antara negara berkembang dan maju.

Ketiga, regresi OLS (*Ordinary Least Square*) digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen, kualitas pelaporan SDGs dan variabel independen, faktor tekanan isomorfisme koersif. Mengadaptasi (Osborn et al. 2015), penelitian ini menggunakan dua model regresi di tingkat negara dan perusahaan. Model regresi di tingkat perusahaan dengan variabel kontrol dalam penelitian ini ditunjukkan pada persamaan (2)

$$SDGD_{it} = \beta_0 + \beta_1 RQ_{it-1} + \beta_2 SR_{it-1} + \beta_3 SARS_{it-1} + \beta_4 CSR_Comm_{it-1} + \beta_5 Industry_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Untuk menganalisis tingkat negara, skor pelaporan SDGs rata-rata dari semua perusahaan sampel di suatu negara digunakan untuk mendapatkan skor pengungkapan di tingkat negara. Model regresi di tingkat negara bagian ditunjukkan dalam persamaan (3):

$$SDGD_{it} = \beta_0 + \beta_1 RQ_{it-1} + \beta_2 SR_{it-1} + \beta_3 SARS_{it-1} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

5 Hasil Statistik

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Forbes' 2000 pada tahun 2020 dari 61 negara yang berbeda. Setelah proses pengumpulan data, sampel akhir penelitian ini adalah 879 perusahaan dari 52 negara. Tabel 1 Panel A menjelaskan proses pemilihan sampel. Tabel 1 Panel B menunjukkan distribusi perusahaan sampel berdasarkan industri. Tabel menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan (26%), diikuti oleh perusahaan sektor industri (13%) dan sektor material (10%). Sektor jasa telekomunikasi memiliki sampel terendah sebesar 4%.

Tabel 2 Panel A memberikan gambaran umum tentang distribusi sampel berdasarkan negara dan wilayah geografis. Tabel 2 Panel B memberikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Perusahaan yang mendominasi sampel penelitian berasal dari Amerika Serikat, dengan berat hingga 23%. Namun, jika dilihat berdasarkan kelompok geografis, tidak terdapat perbedaan distribusi sampel yang signifikan antara perusahaan dari Asia (31,4%), Eropa (35,38%), dan Amerika (29,12%).

Tabel 2: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Panel A: Skor Variabel Tingkat Negara							
Negara	% Sampel	Sampel	Jumlah SDG	RQ	SR	SARS	Status Ekonomi *
Afrika	1.48%	13	0.59	57.77	3.00	5.05	
Kenya	0.11%	1	0.53	35.58	3.00	4.50	Mengembangkan
Afrika Selatan	1.37%	12	0.59	59.62	3.00	5.10	Mengembangkan
Amerika	29.12%	256	0.51	83.88	2.96	5.70	
Argentina	0.23%	2	0.44	31.73	3.00	4.20	Mengembangkan
Brasil	1.59%	14	0.60	46.15	3.00	4.70	Mengembangkan
Kanada	3.07%	27	0.55	94.23	3.00	5.90	Dikembangkan
Cile	0.11%	1	0.71	81.73	3.00	5.60	Mengembangkan
Kolombia	0.23%	2	0.38	63.46	3.00	5.00	Mengembangkan
Meksiko	0.91%	8	0.84	54.81	2.00	5.20	Mengembangkan
Peru	0.11%	1	0.35	70.19	3.00	4.60	Mengembangkan
Amerika Serikat	22.75%	200	0.48	87.50	3.00	5.80	Dikembangkan
Venezuela	0.11%	1	0.53	1.44	0.00	4.10	Mengembangkan
Asia	31.40%	276	0.63	75.78	2.96	5.38	
Cina	7.51%	66	0.70	50.00	3.00	4.50	Mengembangkan
Hong Kong	3.19%	28	0.57	97.12	3.00	6.30	Mengembangkan
India	0.68%	6	0.71	47.60	3.00	4.70	Mengembangkan
Indonesia	0.46%	4	0.60	55.29	3.00	4.60	Mengembangkan
Israel	0.34%	3	0.47	87.02	3.00	5.90	Mengembangkan
Jepang	6.03%	53	0.63	89.42	3.00	5.80	Dikembangkan
Kuwait	0.23%	2	0.88	62.50	3.00	4.50	Mengembangkan
Malaysia	0.80%	7	0.58	74.04	3.00	5.40	Mengembangkan
Oman	0.11%	1	0.53	66.83	3.00	5.20	Mengembangkan
Filipina	0.34%	3	0.84	53.37	3.00	5.10	Mengembangkan
Qatar	0.23%	2	0.29	75.96	3.00	5.40	Mengembangkan
Arab Saudi	0.46%	4	0.62	61.54	0.00	5.50	Mengembangkan
Singapura	0.80%	7	0.53	100	3.00	6.30	Mengembangkan
Korea Selatan	4.32%	38	0.60	81.25	3.00	5.30	Mengembangkan
Taiwan	4.32%	38	0.59	89.90	3.00	5.90	Mengembangkan
Thailand	1.14%	10	0.64	58.65	3.00	4.90	Mengembangkan
Uni Emirat Arab	0.46%	4	0.50	82.69	3.00	5.30	Mengembangkan
Eropa	35.38%	311	0.56	84.49	2.86	5.42	
Austria	0.91%	8	0.57	90.87	3.00	6.20	Dikembangkan
Belgia	0.80%	7	0.63	88.94	3.00	5.80	Dikembangkan
Siprus	0.11%	1	1.00	80.77	3.00	4.80	Mengembangkan
Republik Ceko	0.11%	1	0.71	86.54	3.00	5.20	Dikembangkan

Panel A: Skor Variabel Tingkat Negara

Negara	% Sampel	Sampel	Jumlah SDG	RQ	SR	SARS	Status Ekonomi *
Denmark	1.02%	9	0.42	97.60	3.00	5.70	Dikembangkan
Finlandia	0.91%	8	0.41	99.04	3.00	6.50	Dikembangkan
Prancis	4.55%	40	0.55	85.58	3.00	5.40	Dikembangkan
Jerman	3.64%	32	0.52	93.27	3.00	5.40	Dikembangkan
Yunani	0.34%	3	0.71	72.12	3.00	3.80	Dikembangkan
Hongaria	0.11%	1	0.35	67.79	3.00	5.00	Dikembangkan
Irlandia	1.25%	11	0.50	91.83	3.00	5.30	Dikembangkan
Italia	2.50%	22	0.63	68.27	3.00	4.40	Dikembangkan
Luxembourg	0.46%	4	0.79	98.56	3.00	6.10	Dikembangkan
Belanda	1.59%	14	0.44	96.63	3.00	6.20	Dikembangkan
Norwegia	0.68%	6	0.49	95.67	3.00	6.00	Dikembangkan
Polandia	0.23%	2	0.50	76.44	3.00	4.70	Dikembangkan
Portugal	0.34%	3	0.41	75.48	3.00	4.30	Dikembangkan
Rusia	2.16%	19	0.67	36.06	3.00	4.30	Dikembangkan
Spanyol	1.93%	17	0.70	73.56	3.00	5.50	Dikembangkan
Swedia	2.84%	25	0.53	95.19	3.00	6.00	Dikembangkan
Swiss	2.50%	22	0.56	93.75	1.00	6.10	Dikembangkan
Turki	1.02%	9	0.55	51.92	3.00	4.40	Mengembangkan
Inggris	5.35%	47	0.53	92.31	3.00	5.40	Dikembangkan
Oseania	2.62%	23	0.57	98.08	3.00	5.90	
Australia	2.62%	23	0.57	98.08	3.00	5.90	Dikembangkan
Total Keseluruhan	100%	879	0.56	81.54	2.92	5.50	

Panel B: Variabel Penelitian Statistika Deskriptif

	SDGs	RQ	SR	SARS
Berarti	0.58	74.34	2.83	5.26
Standar Deviasi	0.14	21.39	0.65	0.67
Minimum	0.29	1.44	0	3.8
Maksimum	1	100	3	6.5

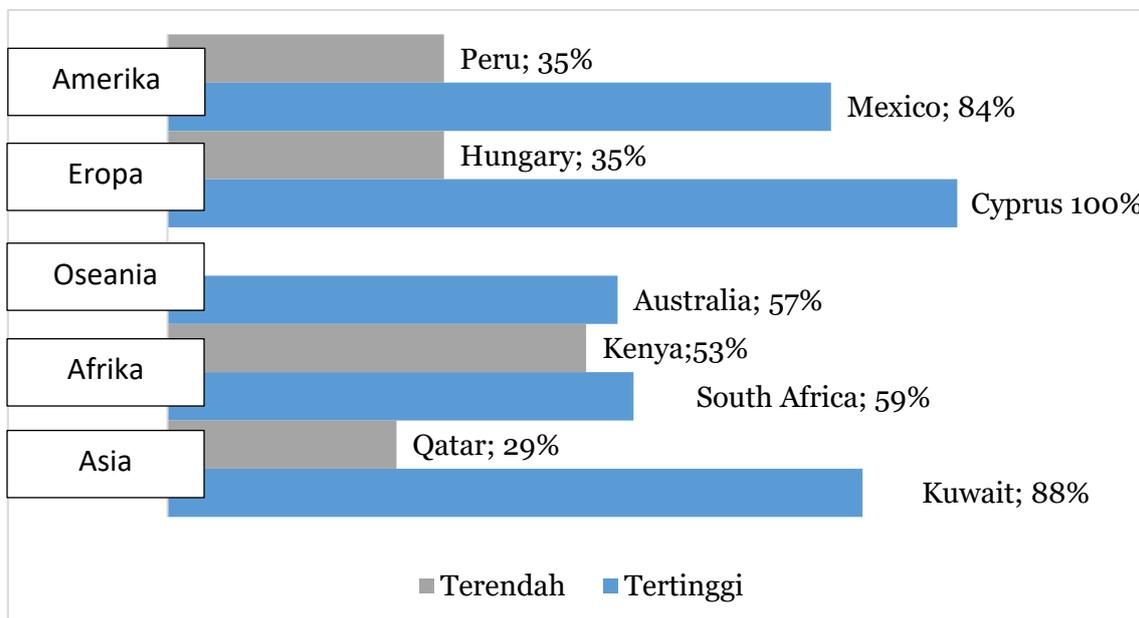
*Kelompok Geografis dan Klasifikasi Status Ekonomi berdasarkan UNCTAD (2022)

Dalam variabel kualitas pelaporan SDG, negara dengan skor pelaporan tertinggi adalah Siprus (100%), sedangkan negara dengan skor pelaporan terendah adalah Qatar (29%). Dalam variabel kualitas regulasi (RQ), Singapura dan Finlandia memiliki skor regulasi tertinggi (100 dan 99), sedangkan Venezuela memiliki skor kualitas regulasi terendah (1,44). Pada variabel regulasi keberlanjutan, sebagian besar negara dalam sampel penelitian ini sudah memiliki setidaknya satu regulasi yang mensyaratkan pelaporan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Hanya Arab Saudi dan Venezuela yang tidak memiliki satu pun peraturan pelaporan ESG. Pada variabel SARS yang menggambarkan kualitas lembaga akuntansi di suatu negara, Finlandia memiliki skor SARS tertinggi yaitu 6,5, sedangkan Yunani memiliki skor SARS terendah yaitu 3,8.

Kualitas pelaporan SDGs sebagai pertanyaan penelitian pertama dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks pelaporan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan SDGs yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Tabel 2 Panel A memetakan kinerja pelaporan SDGs berdasarkan negara dan wilayah geografis sampel penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, skor pelaporan tertinggi berada di Kawasan Asia, dengan nilai 63% atau pelaporan terhadap 11 SDGs.

Selain itu, Afrika dan Oseania memiliki skor pelaporan 57%, dan 58% melaporkan setidaknya 10 SDGs tetapi dengan proporsi sampel yang relatif rendah. Sementara itu, Eropa dan Amerika melaporkan setidaknya 9 sasaran SDGs dengan skor pelaporan 56% dan 51%.

Gambar 1 mengulas negara-negara dengan skor pelaporan tertinggi dan terendah di setiap wilayah geografis. Di Asia, perusahaan di Kuwait dan Filipina memiliki skor pelaporan tertinggi sebesar 88% dan 84%, sedangkan perusahaan di Qatar memiliki skor pelaporan terendah sebesar 29%. Afrika hanya terdiri dari dua negara, Kenya dan Afrika Selatan, dengan skor pelaporan 53% dan 59%. Australia adalah satu-satunya negara yang mewakili Oseania dengan skor pelaporan 57%. Di Eropa, Siprus memiliki skor pelaporan tertinggi 100%, sedangkan Hongaria memiliki skor pelaporan terendah 35%. Di Meksiko memiliki skor pelaporan tertinggi 84% di Amerika Peru memiliki skor pelaporan terendah sebesar 35%.



Gambar 1 Negara dengan Skor Pelaporan SDGs Tertinggi dan Terendah

Tabel 3 memberikan hasil analisis statistik deskriptif variabel pelaporan SDGs berdasarkan status ekonomi negara sampel. Berdasarkan total 52 negara sampel, 48%, atau 25 negara, berasal dari negara maju, sedangkan 52% dari sampel atau 27 negara, berasal dari negara berkembang. Rata-rata skor pengungkapan SDGs yang diperoleh negara maju adalah 0,55 atau melaporkan 9 tujuan SDGs, sedangkan skor yang diperoleh negara berkembang adalah 0,61 atau melaporkan 10 tujuan SDGs.

Tabel 3 Pelaporan SDGs Statistik Deskriptif Berdasarkan Status Ekonomi

	Dikembangkan Negara	Mengembangkan Negara
Berarti	0,55	0,60
Standar Deviasi	0,11	0,16
Minimum	0,35	0,29
Maksimum	0,79	1,00
Jumlah Sampel	25	27

Para peneliti melakukan tes tambahan untuk membuktikan apakah ada perbedaan skor pelaporan SDGs antara negara maju dan berkembang. Pengujian yang dilakukan adalah statistik T Test untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada skor rata-rata kedua kelompok negara tersebut. Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,8. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata skor pelaporan SDGs antara negara maju dan berkembang.

Tabel 4 Hasil Statistik Uji T 1
uji-t untuk Kesetaraan Sarana

	t	Df	Sig. (2-ekor)
Skor Pelaporan SDGs	-.202	43.752	.841

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Bose dan Khan (2022), yang membuktikan bahwa skor pelaporan SDGs di negara maju tidak lebih tinggi daripada di negara berkembang. Hasil ini terkait dengan desain beberapa tujuan dan target individu yang dibentuk dan dikalibrasi secara eksplisit untuk mengekspresikan kebutuhan dan aspirasi negara-negara berkembang (Osborn et al. 2015). Menurut Fehling et al. (2013) desain tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan MDGs yang tidak melibatkan aktor dari negara berkembang dalam perumusannya. Pada akhirnya, peran aktif negara maju dalam membangun kemitraan dengan negara berkembang merupakan salah satu kunci utama pencapaian SDGs (de Jong dan Vijge 2021).

Gambar 2 menyajikan tingkat kinerja dan pelaporan pada masing-masing dari 17 tujuan SDG. Secara keseluruhan, skor pelaporan SDGs Forbes 2020 pada tahun 2020 adalah 56% dari 17 SDGs dan pelaporan yang sama pada 10 SDGs. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian Bose dan Khan (2022) yang hanya melaporkan tingkat pelaporan sebesar 9,7% pada tahun 2019, Rosati dan Faria (2019a) yang melaporkan tingkat adopsi SDGs sebesar 16,4% pada tahun 2016, serta van der Waal dan Thijssens (2020) yang melaporkan tingkat keterlibatan perusahaan sebesar 40% dengan SDGs pada tahun 2017. Tujuan yang paling banyak dilaporkan adalah Tujuan 13, mengatasi perubahan iklim (87% dari sampel),

Tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (85%), diikuti oleh Tujuan 12, konsumsi dan produksi berkelanjutan (76%), dan Tujuan 3, kehidupan yang sehat dan sejahtera (69%). Tujuan SDGs yang paling sedikit dilaporkan oleh perusahaan sampel selama pandemi adalah SDG 14, ekosistem laut (26% dari sampel), SDG 2, nol kelaparan (29%), dan SDG 1, Tanpa Kemiskinan (38%).



Gambar 2 Peta Pohon SDGs Melaporkan Skor berdasarkan Tujuan pada tahun 2020

Dibandingkan dengan Bose dan Khan (2022), yang dilakukan setahun sebelum pandemi, tidak ada perbedaan signifikan mengenai tujuan yang paling banyak dan paling sedikit dilaporkan oleh perusahaan. Empat gol yang paling banyak dilaporkan pada tahun sebelum dan sesudah pandemi adalah secara konsisten Goal 8, Goal 13, Goal 12, dan Goal 3. Hanya ada pertukaran prioritas antara tujuan 13, mengatasi perubahan iklim, dan Tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di tahun pandemi 2020.

Alasan yang mendasari meningkatnya prioritas perubahan iklim oleh perusahaan di era pandemi mungkin karena karakteristik yang sama antara keduanya. Setidaknya ada tiga kesamaan antara risiko pandemi dan perubahan iklim yang disajikan oleh Pinner et al. (2020):

Pertama, keduanya merupakan bencana dan krisis dalam bentuk fisik yang dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi. Kedua, Pandemi dan perubahan iklim memiliki risiko sistemik, karena manifestasi dan efek langsungnya menyebar dengan cepat ke

seluruh dunia yang saling berhubungan. Ketiga, keduanya adalah pengganda risiko, menyoroti dan memperburuk kerentanan yang melekat dalam sistem keuangan, perawatan kesehatan, dan sosial.

Secara riil, baik pandemi maupun perubahan iklim bukanlah "angsa hitam" karena para ahli terus-menerus memperingatkan risiko yang harus dihadapi manusia karena dua hal ini (Pereira da Silva 2020). Fakta-fakta ini telah menunjukkan bahwa adalah suatu keharusan bahwa perusahaan menjadi lebih fokus untuk mengatasi masalah perubahan iklim setelah merasakan dampak pandemi, yang cukup mengejutkan bagi operasi dan keberlanjutan perusahaan.

Regresi Ordinary Least Square digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang diajukan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) 25.0. Tabel 5 menyajikan hasil dari analisis regresi OLS.

Tabel 5 Hasil Regresi OLS

Pola	Analisis Tingkat Negara			Analisis Tingkat Perusahaan		
	B	t	Sig.	B	t	Sig.
1 (Konstan)	-0.020	-0.372	0.712	0.027	5.668	0.000
RQ	0.362	2.724	0.009	0.138	26.452	0.000
SR	0.488	3.787	0.000	0.259	16.649	0.000
SARS	0.228	2.496	0.016	0.053	10.639	0.000
CSRComm				0.000	-0.096	0.923
Industri				0.007	2.074	0.038
a. Variabel Dependen: SDG						
Ringkasan Model						
R Square yang disesuaikan			0.710	0.662		
Model Regresi			.000 ^b	.000 ^b		

Uji-F dilakukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi signifikansi keseluruhan variabel (Saunders et al. 2009). Berdasarkan Tabel 5, nilai model regresi keseluruhan untuk tingkat negara dan perusahaan adalah 0,000, yang lebih kecil dari

tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara keseluruhan, baik di tingkat negara maupun perusahaan, secara signifikan mempengaruhi variabel dependen kualitas pelaporan SDGs.

Berdasarkan Tabel 5, nilai *Adjusted R Square* pada analisis tingkat negara adalah 0,710. Nilai ini menunjukkan bahwa 71,0% kualitas pelaporan SDGs dipengaruhi oleh variabel SR, RQ, dan SARS, sedangkan faktor lain di luar penelitian ini mempengaruhi sisanya (29,0%). Sedangkan untuk analisis tingkat perusahaan, *Adjusted R Square* memiliki nilai 0,662. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tingkat perusahaan, 66,2% kualitas pelaporan SDGs dipengaruhi oleh variabel SR, RQ, SARS, komite CSR, dan industri, sedangkan sisanya (33,8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Uji-t, atau dikenal sebagai uji parsial, digunakan untuk melihat bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini (Hinton et al. 2014). Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan SDGs.

Hasil dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tingkat negara, nilai t sebesar 2,724 > nilai t-tabel (2,01 dengan $df=45$) dan nilai Sig, 0,009, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Di tingkat perusahaan, nilai sig., 0,000, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini mengkonfirmasi hipotesis 1 pada kedua tingkat analisis. Selanjutnya, Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien pada analisis tingkat negara positif sebesar 0,362 atau 36,2% lebih besar dari nilai koefisien di tingkat perusahaan, yaitu hanya 0,138 atau 13,8% dari kualitas pelaporan SDGs.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa regulasi keberlanjutan mempengaruhi kualitas pelaporan SDGs. Hasil dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tingkat negara, nilai sig., 0,000, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Di tingkat perusahaan, nilai sig., 0,000, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tes pada kedua tingkat mengkonfirmasi hipotesis 2. Selanjutnya, Tabel 4.8 menunjukkan bahwa analisis koefisien Nilai di tingkat negara positif sebesar 0,488 atau 48,8% lebih besar dari nilai koefisien di tingkat perusahaan, yaitu hanya 0,259 atau 25,9% dari kualitas pelaporan SDGs.

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa kekuatan standar audit dan pelaporan (SARS) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan SDGs. Hasil dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tingkat negara, nilai sig., 0,016 kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Pada tingkat perusahaan, nilai *Sig.* = 0. 000 kurang dari tingkat signifikansi 0, 05. Hasil uji pada kedua tingkatan mengkonfirmasi hipotesis 3. Selanjutnya, Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien dalam analisis tingkat negara positif sebesar 0,228 atau 22,8% lebih besar dari nilai koefisien di tingkat perusahaan, yaitu hanya 0,053 atau 5,3% terhadap kualitas pelaporan SDGs.

Penelitian ini menguji dua variabel kontrol: komite CSR dan industri perusahaan. Komite CSR ditemukan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan SDGs, sedangkan industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan SDGs.

6 Pembahasan dan Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tiga hipotesis terkait tekanan isomorfisme koersif di tingkat negara dan pengaruhnya terhadap pelaporan SDGs. Pandemi Covid-19 telah menampar dunia usaha dalam menghadapi pentingnya keberlanjutan dan memberikan bukti kerapuhan sistem operasi perusahaan yang tidak mendukung nilai keberlanjutan. Kesamaan karakteristik pandemi dan perubahan iklim juga mendorong penguatan kembali strategi perusahaan untuk mengatasi risiko perubahan iklim yang sering diabaikan dan diremehkan.

Di sisi lain, pandemi telah membuktikan bahwa upaya keberlanjutan yang digarisbawahi dalam transparansi kinerja keberlanjutan dapat memberikan ketahanan di tengah pandemi dalam bentuk kurangnya paparan risiko sistematis (Pinner et al. 2020). Perusahaan yang selama ini berhati-hati dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial terbukti lebih siap dalam situasi yang tidak terduga seperti pandemi (Adams dan Abhayawansa 2021). Hasil ini telah mendorong penyebaran praktik keberlanjutan oleh perusahaan global besar, sebagaimana dibuktikan oleh kualitas pelaporan SDGs, yang meningkat pada tahun 2020 selama pandemi. Pelembagaan praktik keberlanjutan yang lebih sistematis dan struktural juga didukung dengan pembentukan ISSB oleh IFRS.

Teori kelembagaan menjelaskan alasan munculnya berbagai praktik baru, seperti praktik pelaporan SDGs dan homogenisasi praktik dalam lingkungan organisasi yang dapat disebabkan oleh tiga bentuk tekanan, tekanan koersif, normatif, dan mimetik

(DiMaggio dan Powell 1983). SDGs yang merupakan salah satu paradigma pembangunan yang baru disahkan pada tahun 2015, serta karakteristik sistemik dan regresif dari pandemi yang memicu pelaporan SDGs yang dilakukan oleh perusahaan, saat ini masih pada tahap awal, yaitu defensive reporting, yang terutama didorong oleh tekanan koersif (Shabana et al. 2017).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tekanan koersif yang berasal dari kualitas regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan SDGs. Dengan kata lain, negara-negara dengan kualitas regulasi yang lebih baik dapat menekan perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi mereka untuk mengadopsi dan melaporkan lebih banyak SDGs. Hasil ini sejalan dengan kerangka kerja yang dibangun oleh Campbell (2006) bahwa perusahaan lebih cenderung bertindak dan mengambil strategi yang bertanggung jawab secara sosial ketika ada peraturan tingkat negara bagian yang solid dan ditegakkan dengan baik untuk memastikan perilaku tersebut.

Hasil ini mengkonfirmasi penelitian García-Sánchez et al. (2020b), yang menemukan bahwa mekanisme penegakan hukum yang efisien memiliki efek positif dan signifikan pada transparansi pelaporan CSR. Penelitian oleh Gerged et al. (2021) juga menemukan bahwa kualitas penegakan hukum di tingkat negara telah terbukti mempengaruhi pelaporan lingkungan di Negara-negara Arab dan negara-negara di Eropa (De Villiers dan Marques 2016).

Regulasi keberlanjutan, hipotesis kedua dalam penelitian ini, telah terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi perusahaan yang mengadopsi praktik pelaporan SDGs. Menurut teori kelembagaan, adanya regulasi dan tekanan politik dalam memberikan pengawasan dan kontrol terhadap regulasi yang berlaku akan mengurangi keragaman dan berujung pada isomorfisme dalam perilaku suatu organisasi (Powell dan DiMaggio 1991). Regulasi pengungkapan kewajiban pada aspek ESG merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah yang semakin sadar akan pentingnya komitmen dan pengelolaan operasional bisnis yang tahan terhadap krisis seperti pandemi (Ioannou dan Serafeim 2017). Peraturan ini juga dibentuk karena tekanan budaya dan nilai dari masyarakat dunia, yang selama ini lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu keberlanjutan, dan risiko perubahan iklim serta memiliki harapan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang mendukung hal-hal tersebut (Worts 2006).

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan studi sebelumnya oleh Rosati dan Faria (2019b), yang menemukan bahwa tingkat kinerja CSR nasional yang lebih tinggi mendorong adopsi pelaporan SDGs. Penelitian Bose dan Khan (2022) membuktikan intensitas pelaporan SDGs yang lebih tinggi di negara-negara dengan peraturan keberlanjutan yang ketat serta penelitian oleh (Plastun et al. 2021) yang membuktikan bahwa regulasi pelaporan ESG di tingkat negara telah terbukti mempengaruhi posisi negara-negara dalam peringkat Indeks SDGs.

Kualitas kelembagaan akuntansi yang dimasukkan ke dalam standar audit dan pelaporan yang kuat juga telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap praktik pelaporan SDGs. Negara-negara dengan standar audit pelaporan yang kuat akan melaporkan lebih banyak item SDG pada tahun 2020. SARS merupakan salah satu instrumen yang cukup mengikat bagi perusahaan dan telah dipercaya sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan.

Standar audit dan pelaporan adalah faktor kelembagaan penting yang mendukung praktik keberlanjutan di sektor swasta (van Zanten dan van Tulder 2018). Pasalnya, proses pelaporan SDGs terjadi di lingkungan lembaga akuntansi yang dibentuk berdasarkan peraturan berupa standar audit dan pelaporan yang harus dipatuhi oleh perusahaan (Amara et al. 2020). Negara-negara yang dicirikan oleh tingkat SARS yang tinggi memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap standar audit dan pelaporan (BooLaky et al. 2013) dan melaporkan lebih banyak item keberlanjutan seperti SDGs.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan studi sebelumnya oleh Guidara et al. (2022), yang menemukan hubungan antara SARS dan keberlanjutan. Pengamatan dilakukan pada 500 sampel perusahaan dan menunjukkan bahwa SARS secara positif terkait dengan tingkat keberlanjutan dan akan lebih tegas pada perusahaan dengan perilaku etis yang tinggi. Hasil penelitian ini juga menegaskan keakuratan kebijakan yang diambil oleh berbagai lembaga akuntansi di era pandemi, yang terus menekankan pentingnya pelaporan isu keberlanjutan. Misalnya, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) telah mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang terkait dengan hak asasi manusia pada tahun 2020. Contoh lain adalah India yang mulai mewajibkan 1.000 perusahaan terdaftar terbesar di bursa untuk mengajukan Laporan Tanggung Jawab Bisnis dan Keberlanjutan dengan informasi yang

mencakup berbagai faktor SDGs, termasuk tunjangan kesejahteraan dan upah rata-rata, keragaman gender, dan penggunaan sumber daya.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya membangun arsitektur kelembagaan berupa badan resmi seperti International Sustainability Standard Board (ISSB) yang baru saja dibentuk pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada tahun 2021 (Khakimovna dan Oktyamovna 2022). ISSB merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam perkembangan kegiatan pelaporan akuntansi selama beberapa dekade terakhir, yang diharapkan dapat menciptakan konsistensi dan komparabilitas yang telah lama menjadi masalah dalam pelaporan keberlanjutan (Kummer 2021).

Hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua implikasi terhadap literatur akuntansi dan praktik akuntansi. Penelitian ini menjembatani kesenjangan ketiadaan riset akuntansi yang berfokus pada isu pelaporan SDGs di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaporan perusahaan selama pandemi mengambil bentuk pelaporan defensif dan didorong oleh tekanan koersif dari organisasi formal seperti pemerintah dan pembuat standar akuntansi. Hasil ini menyiratkan bahwa di era pemulihan pasca pandemi Covid-19, praktik pelaporan SDGs oleh organisasi dapat didominasi oleh tekanan normatif berupa pelaporan proaktif dan pelaporan imitatif mulai terbentuk yang berasal dari tekanan mimetik (Shabana et al. 2017).

Untuk praktik akuntansi, hasil penelitian ini merupakan dorongan awal bagi perusahaan untuk memprioritaskan dan memanfaatkan momentum pemulihan dari pandemi Covid-19 dengan memulai kegiatan yang mendorong prinsip keberlanjutan dan mengambil pendekatan sistematis untuk membangun ketahanan operasional bisnis dari berbagai risiko seperti perubahan iklim. Perusahaan memiliki peluang baru untuk membuat operasi mereka lebih tangguh dan berkelanjutan setelah merasakan dampak pandemi pada operasi bisnis mereka.

Kepada pemerintah, lembaga formal yang membentuk kualitas regulasi dan mengatur berbagai regulasi keberlanjutan, hasil penelitian ini menekankan peran pemerintah dalam memastikan regulasi yang terbentuk di tengah era ketidakpastian harus berkualitas di setiap tahap krisis, terutama pada masa pemulihan. Pemerintah dapat menjamin kualitas regulasi dengan terus berkonsultasi dengan berbagai kalangan ahli saat

merumuskan kebijakan di era krisis. Selain itu, kerja sama regulasi internasional dapat terus digunakan dalam menyelaraskan respons berbagai pemerintah di seluruh dunia untuk pulih dari krisis dengan lebih cepat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keberlanjutan, salah satu instrumen hukum untuk mendorong pelaporan berkelanjutan, memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan agar melaporkan lebih banyak SDGs. Hasil ini menyiratkan bahwa peraturan keberlanjutan yang diberlakukan oleh regulator pasar keuangan dan bursa saham juga dapat menekan perusahaan untuk bertindak dan beroperasi dengan cara yang mendukung keberlanjutan. Munculnya berbagai jenis tekanan tidak lepas dari pemangku kepentingan lainnya yang terus menuntut informasi kegiatan perusahaan yang mendukung keberlanjutan.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika tuntutan berbagai peraturan tersebut tidak diakomodasi oleh lingkungan lembaga akuntansi berupa standar pelaporan non keuangan yang membuat pelapor, pengguna laporan, dan pengambil kebijakan tidak berbicara dalam bahasa pelaporan yang sama. Masalah ini pada akhirnya membentuk salah satu perkembangan pelaporan non-keuangan yang paling signifikan dalam dekade ini, yaitu pembentukan ISSB oleh IFRS untuk menciptakan dan menyatukan bahasa pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung langkah ini dengan menunjukkan bahwa kualitas lembaga akuntansi dalam bentuk standar yang mengikat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kegiatan pelaporan SDGs.

Pada akhirnya, memastikan hasil yang paling optimal bagi investor, pekerja, dan konsumen adalah salah satu tujuan akhir dari berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti melaporkan SDGs. Peran organisasi formal seperti pemerintah, badan pengatur, dan badan pembuat standar akuntansi tetap berada di garis depan dalam merancang kebijakan yang memastikan pengungkapan informasi berkualitas dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam kerangka pelaporan terpadu di antara berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda.

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan yang dapat ditingkatkan dalam berbagai penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga determinan pelaporan SDGs yang berasal dari tekanan koersif. Penelitian ke depan dapat mengkaji faktor kelembagaan lain berupa tekanan normatif dan tekanan mimetik sebagai penentu

pelaporan SDGs atau faktor internal perusahaan, seperti tata kelola, yang dapat mempengaruhi tingkat pelaporan SDGs. Yang hanya berfokus pada satu titik waktu penelitian, yakni pada 2020, saat pandemi Covid-19 terjadi. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian *time series* yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena pelaporan SDGs di masa lalu, selama, dan setelah pandemi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kegiatan pelaporan SDGs oleh perusahaan.

Referensi

- Abidoye B, Felix J, Kapto S, Patterson L (2021) Leaving No One Behind: Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (SDGs)
- Adams CA, Abhayawansa S (2021) Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for 'harmonisation' of sustainability reporting. *Critical Perspectives on Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309>
- Adams CA, Druckman PB, Picot RC (2020) Sustainable development goal disclosure (SDGD) recommendations. ACCA: London, UK
- AlHares A, Elamer AA, Alshbili I, Moustafa MW (2020) Board structure and corporate R&D intensity: evidence from Forbes global 2000. *International Journal of Accounting & Information Management*
- Amara I, Khelif H, El Ammari A (2020) Strength of auditing and reporting standards, corruption and money laundering: a cross-country investigation. *MAJ* 35:1243–1259. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2018-2026>
- Amor-Esteban V, Galindo-Villardón M-P, García-Sánchez I-M, David F (2019) An extension of the industrial corporate social responsibility practices index: New information for stakeholder engagement under a multivariate approach. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 26:127–140. <https://doi.org/10.1002/csr.1665>
- Barbara Kowalczyk Hoyer (2012) Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies
- Bebbington J, Unerman J (2018) Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An enabling role for accounting research. *AAAJ* 31:2–24. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>
- Bebbington J, Unerman J, O'Dwyer B (2014) Sustainability reporting: Insight from institutional theory. In: *Sustainability accounting and accountability*. Routledge, New York, pp 273–285
- Blasco JL, King A, Jayaram S (2018) How to report on the SDGs - KPMG Global

- Boolaky P, Krishnamurti C, Hogue A (2013) Determinants of the Strength of Auditing and Reporting Standards: a Cross-Country Study. *AABFJ* 7:17–36. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v7i4.3>
- Boolaky PK, Cooper BJ (2015) Comparing the Strength of Auditing and Reporting Standards and Investigating their Predictors in Europe and Asia: Auditing & Reporting Strength. *Australian Accounting Review* 25:292–308. <https://doi.org/10.1111/auar.12058>
- Bose S, Khan HZ (2022) Sustainable development goals (SDGs) reporting and the role of country-level institutional factors: An international evidence. *Journal of Cleaner Production* 335:130290. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130290>
- Boța-Avram C (2014) Linking Governance to the Strength of Auditing and Reporting Standards. *Int Adv Econ Res* 20:113–114. <https://doi.org/10.1007/s11294-013-9435-y>
- Campbell JL (2007) Why would corporations behave in socially responsible ways? an institutional theory of corporate social responsibility. *AMR* 32:946–967. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275684>
- Campbell JL (2006) Institutional analysis and the paradox of corporate social responsibility. *American Behavioral Scientist* 49:925–938
- Carroll AB (2021) Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct's Development and Future. *Business & Society* 60:1258–1278. <https://doi.org/10.1177/00076503211001765>
- Christensen HB, Hail L, Leuz C (2021) Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Rev Account Stud* 26:1176–1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Christmann P, Taylor G (2002) Globalization and the environment: Strategies for international voluntary environmental initiatives. *Academy of Management Perspectives* 16:121–135
- Cooke TE (1989) Disclosure in the corporate annual reports of Swedish companies. *Accounting and business research* 19:113–124
- Cosma S, Venturelli A, Schwizer P, Boscia V (2020) Sustainable development and European banks: A non-financial disclosure analysis. *Sustainability* 12:6146
- Curtó-Pagès F, Ortega-Rivera E, Castellón-Durán M, Jané-Llopis E (2021) Coming in from the cold: A longitudinal analysis of SDG reporting practices by Spanish listed companies since the approval of the 2030 agenda. *Sustainability* 13:1178
- Datta S, Goyal S (2022) Determinants of SDG Reporting by Businesses: A Literature Analysis and Conceptual Model. *Vision* 097226292210960. <https://doi.org/10.1177/09722629221096047>

- De Iorio S, Zampone G, Piccolo A (2022) Determinant Factors of SDG Disclosure in the University Context. *Administrative Sciences* 12:21
- de Jong E, Vijge MJ (2021) From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development. *Earth System Governance* 7:100087. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100087>
- De Villiers C, Marques A (2016) Corporate social responsibility, country-level predispositions, and the consequences of choosing a level of disclosure. *Accounting and Business Research* 46:167–195. <https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1039476>
- Deegan C (2014) *Financial accounting theory*, 4th edition. McGraw-Hill Education Australia Pty Ltd, North Ryde, NSW
- DiMaggio P, Powell WW (1983) The iron cage revisited: Collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields. *American sociological review* 48:147–160
- Emma G-M, Jennifer M-F (2021) Is SDG reporting substantial or symbolic? An examination of controversial and environmentally sensitive industries. *Journal of Cleaner Production* 298:126781
- Fehling M, Nelson BD, Venkatapuram S (2013) Limitations of the Millennium Development Goals: a literature review. *Global Public Health* 8:1109–1122. <https://doi.org/10.1080/17441692.2013.845676>
- Fernando S, Lawrence S (2014) A theoretical framework for CSR practices: Integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. *Journal of Theoretical Accounting Research* 10:149–178
- Frey B (2022) Reporting on the SDGs | UN Global Compact. In: UNGC. <https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting>. Accessed 17 Apr 2022
- Frias-Aceituno JV, Rodríguez-Ariza L, García-Sánchez IM (2013) Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study. *Journal of cleaner production* 44:45–55
- Friedman BA, Cox PL, Tribunella T (2011) Relationships among world governance indicators and national per capital income weighted by environmental sustainability. *The BRC Journal of Advances in Business* 1:37–54
- Galleli B, Semprebon E, Santos JAR dos, et al (2021) Institutional Pressures, Sustainable Development Goals and COVID-19: How Are Organisations Engaging? *Sustainability* 13:12330. <https://doi.org/10.3390/su132112330>
- García-Sánchez I-M, Rodríguez-Ariza L, Aibar-Guzmán B, Aibar-Guzmán C (2020a) Do institutional investors drive corporate transparency regarding business

contribution to the sustainable development goals? *Business Strategy and the Environment* 29:2019–2036. <https://doi.org/10.1002/bse.2485>

García-Sánchez I-M, Rodríguez-Ariza L, Aibar-Guzmán B, Aibar-Guzmán C (2020b) Do institutional investors drive corporate transparency regarding business contribution to the sustainable development goals? *Business Strategy and the Environment* 29:2019–2036. <https://doi.org/10.1002/bse.2485>

Gerged AM, Beddewela ES, Cowton CJ (2021) Does the quality of country-level governance have an impact on corporate environmental disclosure? Evidence from GULF COOPERATION COUNCIL countries. *Int J Fin Econ* ijfe.2469. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2469>

Girella L, Rossi P, Zambon S (2019) Exploring the firm and country determinants of the voluntary adoption of integrated reporting. *Business Strategy and the Environment* 28:1323–1340. <https://doi.org/10.1002/bse.2318>

Guidara A, Ammari AE, Khelif H (2022) Strength of auditing and reporting standards, ethical behavior of firms and sustainability: a cross-country investigation. *EMJB* 17:105–116. <https://doi.org/10.1108/EMJB-10-2020-0107>

Gupta V, Wang J (2004) From Corporate Crisis to Turnaround in East Asia: A Study of China Huajing Electronics Group Corporation. *Asia Pacific Journal of Management* 21:213–233. <https://doi.org/10.1023/B:APJM.0000024084.81133.22>

Handoyo S, Fitriyah FK (2018) Control of Corruption, Regulatory Quality, Political Stability and Environmental Sustainability: A Cross-National Analysis. *Journal of Accounting Auditing and Business* 1:28–38

Hinton PR, McMurray I, Brownlow C (2014) *SPSS explained*, Second edition. Routledge, Taylor & Francis Group, London ; New York

Hossain M, Adams M (1995) Voluntary financial disclosure by Australian listed companies. *Australian Accounting Review* 5:45–55

Hummel K, Szekely M (2021) Disclosure on the Sustainable Development Goals – Evidence from Europe. Social Science Research Network, Rochester, NY

Huq FA, Stevenson M (2020) Implementing socially sustainable practices in challenging institutional contexts: Building theory from seven developing country supplier cases. *Journal of Business Ethics* 161:415–442

Ioannou I, Serafeim G (2017) The consequences of mandatory corporate sustainability reporting. Harvard Business School research working paper

Izzo MF, Ciaburri M, Tiscini R (2020) The challenge of sustainable development goal reporting: The first evidence from Italian listed companies. *Sustainability* 12:3494

- Kaufmann D, Kraay A, Mastruzzi M (2011) The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues¹. *Hague journal on the rule of law* 3:220–246
- Khakimovna NF, Oktyamovna SA (2022) Sustainability Reporting Towards Common Standards. *European Journal of Innovation in Nonformal Education* 2:236–239
- Kirkpatrick CH, Parker D (2007) *Regulatory impact assessment: towards better regulation?* Edward Elgar Publishing
- Kummer K (2021) What to watch as global ESG reporting standards take shape. https://www.ey.com/en_ph/public-policy/what-to-watch-as-global-esg-reporting-standards-take-shape. Accessed 18 Aug 2022
- Kuswanto H, Sholihin M, Djajadikerta HG (2022) Exploring the implementation of sustainable development goals: a comparison between private and state-owned enterprises in Indonesia. *Environ Dev Sustain*. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02505-1>
- Lagasio V, Cucari N (2019) Corporate governance and environmental social governance disclosure: A meta-analytical review. *Corp Soc Resp Env Ma* 26:701–711. <https://doi.org/10.1002/csr.1716>
- LeBaron G, Lister J, Dauvergne P (2017) Governing global supply chain sustainability through the ethical audit regime. *Globalizations* 14:958–975
- Legendre S, Coderre F (2013) Determinants of GRI G3 Application Levels: The Case of the Fortune Global 500: Determinants of GRI G3 Application Levels. *Corp Soc Responsib Environ Mgmt* 20:182–192. <https://doi.org/10.1002/csr.1285>
- Lopez B (2020) Connecting business and sustainable development goals in Spain. *Marketing Intelligence & Planning* 38:573–585. <https://doi.org/10.1108/MIP-08-2018-0367>
- Mhlanga R, Gneiting U, Agarwal N (2018) Walking the Talk: Assessing companies' progress from SDG rhetoric to action
- Mombeuil C (2020) Institutional conditions, sustainable energy, and the UN sustainable development discourse: A focus on Haiti. *Journal of Cleaner Production* 254:120153
- MSCI (2022) GICS - Global Industry Classification Standard. <https://www.msci.com/our-solutions/indexes/gics>. Accessed 3 Aug 2022
- Munro V (2021) From CSR “greenwashing” to general “SDG washing”: the potential threat to SDG implementation | Emerald Publishing. In: [emeraldgrouppublishing.com](https://www.emeraldgrouppublishing.com). <https://www.emeraldgrouppublishing.com/opinion-and-blog/csr-greenwashing-general-sdg-washing-potential-threat-sdg-implementation>. Accessed 26 Jul 2022

- Murphy A, Haverstock E, Gara A, et al (2021) Forbes' Global 2000-2021. <https://view.ceros.com/forbes/header-4-1-1-2-4-3-2>. Accessed 18 Apr 2022
- Nguyen CP, Su TD (2021) Tourism, institutional quality, and environmental sustainability. *Sustainable Production and Consumption* 28:786–801
- Nichita E-M, Nechita E, Manea C-L, et al (2020) Reporting on Sustainable Development Goals. A score-based approach with company-level evidence from Central-Eastern Europe economies. *Accounting and Management Information Systems* 19:502–542
- Nundy S, Ghosh A, Mesloub A, et al (2021) Impact of COVID-19 pandemic on socio-economic, energy-environment and transport sector globally and sustainable development goal (SDG). *Journal of Cleaner Production* 312:127705
- Osborn D, Cutter A, Ullah F (2015) Universal sustainable development goals. Understanding the Transformational Challenge for Developed Countries
- Pereira da Silva LA (2020) Green Swan 2: Climate change and Covid-19: reflections on efficiency versus resilience. based on remarks at the OECD Chief Economists Talk Series, Paris, April 23rd and a Research Webinar at the BIS, May 13th, available at: <https://www.bis.org/speeches/sp200514.htm>
- Pinner D, Rogers M, Samandari H (2020) Addressing climate change in a post-pandemic world. *McKinsey Quarterly* April
- Pizzi S, Del Baldo M, Caputo F, Venturelli A (2022) Voluntary disclosure of Sustainable Development Goals in mandatory non-financial reports: The moderating role of cultural dimension. *Journal of International Financial Management & Accounting* 33:83–106. <https://doi.org/10.1111/jifm.12139>
- Pizzi S, Rosati F, Venturelli A (2020) The determinants of business contribution to the 2030 Agenda: Introducing the SDG Reporting Score. *Bus Strat Env* 30:404–421. <https://doi.org/10.1002/bse.2628>
- Pizzi S, Venturelli A, Caputo F (2021) The “comply-or-explain” principle in directive 95/2014/EU. A rhetorical analysis of Italian PIEs. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 12:30–50. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2019-0254>
- Plastun A, Makarenko I, Grabovska T, et al (2021) Sustainable Development Goals in agriculture and responsible investment: A comparative study of the Czech Republic and Ukraine. *Problems and Perspectives in Management* 19:65–76. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(2\).2021.06](https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.06)
- Powell WW, DiMaggio P (eds) (1991) *The New institutionalism in organizational analysis*. University of Chicago Press, Chicago

- Rahman A, Yammeesri J, Perera H (2010) Financial reporting quality in international settings: A comparative study of the USA, Japan, Thailand, France and Germany. *The International Journal of Accounting* 45:1–34
- Refinitiv (2022) Environmental, Social and Governance Score from Refinitiv
- Rengasamy D (2017) Adopting secondary data is boon for accounting research- Conceptual study. *International Journal of Advanced Scientific Research and Management* 2:
- Rosati F, Faria LGD (2019a) Business contribution to the Sustainable Development Agenda: Organizational factors related to early adoption of SDG reporting. *Corp Soc Resp Env Ma* 26:588–597. <https://doi.org/10.1002/csr.1705>
- Rosati F, Faria LGD (2019b) Addressing the SDGs in sustainability reports: The relationship with institutional factors. *Journal of Cleaner Production* 215:1312–1326. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.107>
- Saunders MNK, Lewis P, Thornhill A (2009) *Research methods for business students*, 5th ed. Prentice Hall, New York
- Schwab K (2019) *The global competitiveness report 2019*. World Economic Forum
- Schwab K, Zahidi S, World Economic Forum (2020) *Global Competitiveness Report 2020*. In: World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/>. Accessed 16 Dec 2021
- Scott L, McGill A (2019) *SDG Reporting Challenge 2018*
- Scott WR (2005) Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. *Great minds in management: The process of theory development* 37:460–484
- Sekarlangit LD, Wardhani R (2021) The Effect of the Characteristics and Activities of the Board of Directors on Sustainable Development Goal (SDG) Disclosures: Empirical Evidence from Southeast Asia. *Sustainability* 13:8007. <https://doi.org/10.3390/su13148007>
- Shabana KM, Buchholtz AK, Carroll AB (2017) The Institutionalization of Corporate Social Responsibility Reporting: *Business & Society* 56:.. <https://doi.org/10.1177/0007650316628177>
- Singhania M, Saini N (2021) Institutional framework of ESG disclosures: comparative analysis of developed and developing countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment* 1–44
- Smith M (2003) *Research Methods in Accounting*. SAGE Publications, Ltd, 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London England EC1Y 1SP United Kingdom

- Stafford-Smith M, Griggs D, Gaffney O, et al (2017) Integration: the key to implementing the Sustainable Development Goals. *Sustain Sci* 12:911–919. <https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3>
- Subramaniam N, Junior RM, Akbar S, et al (2019) SDG Measurement and Disclosure by ASX150. RMIT University
- Subramaniam N, Junior RM, Akbar S, et al (2021) SDG Measurement and Disclosure 3.0: A study of ASX150 companies. CPA Australia and RMIT University
- Subramaniam N, Mori Junior R, Akbar S, et al (2020) SDG Measurement and Disclosure 2.0 A study of ASX150 companies
- Tsalis TA, Malamateniou KE, Koulouriotis D, Nikolaou IE (2020) New challenges for corporate sustainability reporting: United Nations' 2030 Agenda for sustainable development and the sustainable development goals. *Corp Soc Responsib Environ Manag* 27:1617–1629. <https://doi.org/10.1002/csr.1910>
- van der Waal JWH, Thijssens T (2020) Corporate involvement in Sustainable Development Goals: Exploring the territory. *Journal of Cleaner Production* 252:119625. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119625>
- van Zanten JA, van Tulder R (2021) Improving companies' impacts on sustainable development: A nexus approach to the SDGs. *Bus Strat Env* 30:3703–3720. <https://doi.org/10.1002/bse.2835>
- van Zanten JA, van Tulder R (2018) Multinational enterprises and the Sustainable Development Goals: An institutional approach to corporate engagement. *J Int Bus Policy* 1:208–233. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0008-x>
- Vaz N, Fernandez-Feijoo B, Ruiz S (2016) Integrated reporting: an international overview: Integrated reporting: an international overview. *Business Ethics: A European Review* 25:577–591. <https://doi.org/10.1111/beer.12125>
- Velte P, Stawinoga M (2020) Do chief sustainability officers and CSR committees influence CSR-related outcomes? A structured literature review based on empirical-quantitative research findings. *J Manag Control* 31:333–377. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00308-x>
- Worts D (2006) Fostering a Culture of Sustainability. *Museums & Social Issues* 1:151–172. <https://doi.org/10.1179/msi.2006.1.2.151>
- Yu S, Sial MS, Tran DK, et al (2020) Adoption and Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in China—Agenda 2030. *Sustainability* 12:6288. <https://doi.org/10.3390/su12156288>

